Analisis Potensi dan Peranan Sektor Perikanan di Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat

Analysis of potential and role of the fishery sector in Majene Regency, West Sulawesi Province

Siti Hajar Suryawati[⊠]

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung BRSDMKP I Lt. 4, Komplek Bina Samudera, Jl. Pasir Putih I, Ancol Timur Jakarta Corresponding author: siti suryawati@yahoo.com

ABSTRAK

Kabupaten Majene merupakan salah satu kabupaten di wilayah Propinsi Sulawesi Barat, dimana hampir semua wilayahnya berbatasan dengan laut. Studi ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan peranan sektor perikanan dalam peningkatan perekonomian wilayah Kabupaten Majene. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Majene Tahun 2010-2018. Alat analisis yang digunakan adalah *Location Quotient* (LQ) dan *Shift Share* (SS). Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor perikanan sebagai salah satu subsektor dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bukan sektor basis dan unggulan bagi Kabupaten Majene. Hasil analisis SS menunjukkan bahwa sektor perikanan bersama dengan pertanian dan kehutanan di Kabupaten Majene masih memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Provinsi Sulawesi Barat, tetapi memiliki keunggulan kompetitif yang rendah. Rekomendasi kebijakan yang disarankan adalah berupaya untuk meningkatkan masuknya investasi pada sektor perikanan serta meningkatkan daya saing sektor perikanan agar lebih kompetitif yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Kata kunci: PDRB, Location Quotient, Shift Share, Majene

Pendahuluan

Dengan diberlakukannya Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah memberikan peluang seluas-luasnya untuk memberdayakan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru dalam menggerakkan pembangunan untuk kemakmuran rakyat sebesarbesarnya. Hal tersebut merupakan suatu paradigma baru yang menuntut efisiensi efektivitas dan percepatan pembangunan di segala sektor termasuk sektor kelautan dan perikanan untuk berpacu mengikuti laju perkembangan pembangunan. Kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di wilayah laut adalah 12 mil bagi provinsi dan 4 mil bagi daerah kabupaten ataupun kota yang di dalamnya terdapat sumberdaya ikan.

Pembangunan dan pengembangan wilayah bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat melalui pembangunan yang terpadu antar sektor dengan memperhatikan aspek keruangan (Dahuri, 2002). Pembangunan wilayah berawal dari timbulnya kesadaran akan adanya masalah ketidakseimbangan pembangunan secara spasial. Lebih khusus kepada pembangunan antar wilayah, masalah agrolomerasi, dan menurunnya daya tarik perdesaan (Rustiadi, dkk., 2011).

Dengan karakteristik wilayah dan potensi daerah yang dimiliki serta strategi pengembangan yang mendukung, maka sektor kelautan dan perikanan seyogyanya menjadi primadona perekonomian dan berperan sebagai basis ekonomi untuk meningkatkan pendapatan wilayah. Kabupaten Majene secara geografis, demografis dan klimatologis sesuai untuk pengembangan usaha perikanan, namun pengembangan sektor perikanan berlangsung lambat.

Instruksi Presiden No. 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional, bahwa dalam rangka percepatan pembangunan industri perikanan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik nelayan, pembudidaya, pengolah, maupun pemasar hasil perikanan, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan devisa negara, Presiden RI mengamanatkan kepada Bupati/walikota untuk mendukung pengadaan lahan industri perikanan nasional di daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana semakin tinggi PDRB maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonominya juga tinggi. Pertumbuhan ekonomi wilayah ini juga dapat menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar daerah (Sjafrizal, 2014). Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis peranan dan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Majene.

Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Majene pada bulan September sampai Desember tahun 2019.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data PDRB Kabupaten Majene dan Propinsi Sulawesi Barat berdasarkan harga berlaku dan harga konstan dengan tahun dasar 2000 pada periode tahun 2010 – 2018 serta data-data lain yang mendukung. Data primer diperoleh dari BPS Propinsi Sulawesi Barat, BPS Kabupaten Majene dan Dinas Kelautan dan Perikanan yang didukung berbagai literatur dan sumber lainnya.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis *Location Quitient* (LQ) dan analisis *Shift Share* (SS) dengan pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel 2019.

Persamaan analisis LQ disajikan bentuk persaman sebagai berkut (Warpani, 1984):

$$LQ_i = \frac{S_{iT}/N_{iK}}{S_T/N_K} = \frac{S_{iT}/S_{iK}}{N_T/N_K}$$

Keterangan: LQ_i = Besarnya *Location Quotient* sektor I; S_{iT} = PDRB sektor i Kabupaten Majene; S_{iK} = PDRB sektor i Propinsi Sulawesi Barat; N_T = Total PDRB Kabupaten Majene; N_K = Total PDRB Propinsi Sulawesi Barat

Nilai LQ > 1 adalah sektor ekonomi basis yang berarti bahwa peranan suatu sektor di suatu wilayah lebih dominan dibandingkan sektor di wilayah induknya dan sebagai petunjuk bahwa wilayah tersebut surplus akan produk sektor tersebut. Sebaliknya, LQ < 1 adalah sektor non basis yang berarti peranan sektor tersebut lebih kecil di wilayah tersebut dibandingkan peranannya di wilayah induknya (Alhowaish *et al.*, 2015; Fattah dan Rahman, 2013).

Persamaan yang digunakan untuk analisis SS adalah:

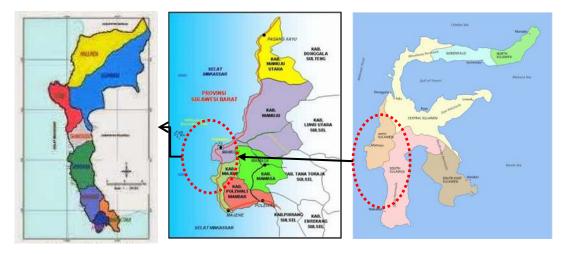
Kontribusi sektor i pada tahun
$$t = \frac{Y_{it}}{Y_t} x 100\%$$

Keterangan: Y_{it} = Nilai PDRB Kabupaten Majene sektor i pada tahun t; Y_t = Nilai total PDRB Kabupaten Majene sektor i pada tahun t

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Secara geografis, Kabupaten Majene terletak pada 2º 38' 45" – 3º 38' 15" Lintang Selatan dan antara 118º 45' 00" – 119º 4' 45" Bujur Timur. Kabupaten Majene terletak di pesisir barat Pulau Sulawesi, yang berhadapan langsung dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Sebesar 95% dari total wilayah perairan Kabupaten Majene masuk dalam alur pelayaran Selat Makassar, yang menghubungkan Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan masuk memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat kurang lebih 146 km. Letak geografis Kabupaten Majene berada dalam jalur lintas barat Pulau Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Secara kondisi Geomorfologi Kabupaten Majene berada pada ketinggian (5 – 1.327) meter dari permukaan laut. Berdasarkan keadaan bentang alamnya terdiri atas satuan 4 morfologi yaitu: Satuan Morfologi Pegunungan, satuan ini menempati Pegunungan Manatattuang; Satuan Morfologi Perbukitan terletak di Daerah Banggae dan Pamboang; Satuan Morfologi Pedataran menempati pesisir pantai barat. Peta Kabupaten Majene dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Majene (Sumber: BPS Kabupaten Majene, 2019)

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir Pantai Barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Panjang garis pantai Kabupaten Majene $\pm 125 \text{km}^2$, dengan luas wilayah laut $\pm 13.124 \text{km}^2$, dan luas daratan $\pm 947,84 \text{ km}^2$ atau $\pm 5,6\%$ dari luas Propinsi Sulawesi Barat. Secara administratif Kabupaten Majene terbagi kedalam 8 Kecamatan, 20 Kelurahan, 62 desa, 369 lingkungan/dusun yang berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut: 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju; 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa; 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar; dan 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. Luas wilayah Kabupaten Majene disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Majene

Kecamatan	Luas (km²)	Persentase
Banggae	25,15	2,65
Banggae timur	30,04	3,17
Pamboang	70,19	7,41
Sendana	82,24	8,68
Tammerodo	55,40	5,84
Tubo Sendana	41,17	4,34
Malunda	187,65	19,80
Ulumanda	456,00	48,11
Majene	947,84	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Majene (2021)

Kecamatan Banggae dan Banggae Timur adalah dua kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah masing-masing 2,65% untuk Kecamatan Banggae dan 3,17% untuk Kecamatan Banggae Timur dari luas total wilayah Kabupaten Majene, sementara Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yaitu 456,06 km² atau 48,11%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 km² atau 19,80%.

Potensi Perikanan

Salah satu sektor yang potensial menjadi unggulan Kabupaten Majene adalah perikanan, terutama untuk perikanan tangkap laut dan budidaya. Jumlah rumah tangga perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Majene disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Laut & Budidaya di Kabupaten Majene 2017 – 2020

Kecamatan	Pe	rikanan Ta	angkap Lau	Perikanan Budidaya				
Recamatan	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Banggae	643	655	816	819	11	11	11	11
Banggae timur	633	644	769	769	100	100	100	100
Pamboang	624	637	579	579	34	34	34	34
Sendana	633	644	785	799	23	23	23	23
Tammerodo	609	618	145	145	18	18	18	18
Tubo Sendana	608	619	270	270	17	19	17	15
Malunda	613	623	292	293	189	189	189	189
Ulumanda	606	614	82	82	111	111	111	111
Majene	4.969	5.054	3.738	3.756	503	505	503	501

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam BPS Kabupaten Majene (2018-2021)

Produksi perikanan tangkap Kabupaten Majene menghasilkan 7.458 ton hasil perikanan laut. Hal ini meningkat dari tahun sebelumnya 4,36 persen dari tahun 2017 ke tahun 2018. Produksi terbesar perikanan laut berasal dari kecamatan Banggae, menyumbang 21,87 persen untuk hasil produksi perikanan Kabupaten Majene. Produksi perikanan budidaya yang berasal dari tambak dan kolam mengalami penurunan sebesar 46,36 persen dari tahun 2017 ke tahun 2018 (BPS Kabupaten Majene, 2019). Perkembangan produksi perikanan laut dan budidaya menurut kecamatan di Kabupaten Majene, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Produksi Perikanan Laut dan Budidaya menurut Kecamatan di Kabupaten Majene 2017 – 2020

Kecamatan	Pe	rikanan T	angkap La	ut	Perikanan Budidaya				
Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	
Banggae	1.869,0	1.631,5	1.614,5	1.700,7	10,3	9	9,3	6,6	
Banggae timur	894,9	1.108,8	1.102,0	1.200,2	678,6	415	336,2	626,6	
Pamboang	889,3	877,0	909,9	927,4	26,6	35	22,4	39,3	
Sendana	922,1	1.108,7	1.187,7	1.109,2	20,2	7	6,4	8,4	
Tammerodo	602,7	740,0	821,9	812,6	8,5	20	20,1	22,8	
Tubo Sendana	684,5	685,0	734,7	786,7	12,5	7	87	15,9	
Malunda	697,0	716,2	720,9	763,9	185,3	38	95,7	216,9	
Ulumanda	587,2	590,8	553,0	529,3	67,9	159	32,9	47,2	
Majene	7.146,7	7.458,0	7.644,7	7.830,0	1.009,9	690	610	983,7	

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam BPS Kabupaten Majene (2018-2021)

Jumlah sarana penangkapan ikan di Kabupaten Majene tahun 2018 sampai 2020, dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Sarana Penangkapan Ikan menurut Jenisnya di Kabupaten Majene Tahun 2018-2020

Kecamatan	Perahu Tanpa Motor			Perahu	Motor Te	mpel	Kapal Motor		
Recalliatali	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Banggae	475	475	340	330	330	207	536	536	272
Banggae Timur	196	196	395	329	329	298	465	465	76
Pamboang	227	227	75	337	337	376	441	441	128
Sendana	221	221	194	32	32	562	432	432	43
Tammerodo	115	115	34	289	289	96	48	48	15
Tubo Sendana	118	118	39	311	311	187	61	61	44
Malunda	134	134	163	318	318	97	420	420	33
Ulumanda	123	123	30	304	304	52	39	39	-
Majene	1.381	1.381	1.270	2.112	2.112	1.875	2.097	2.097	611

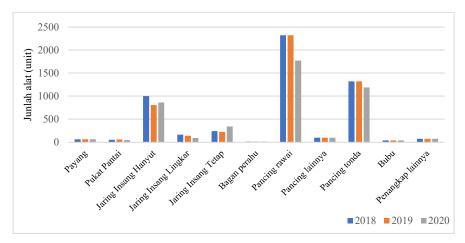
Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam BPS Kabupaten Majene (2018-2021)

Jumlah perahu nelayan di Kabupaten Majene tahun 2018, didominasi oleh kapal jukung dan kapal motor. Namun pada tahun 2020, terjadi perubahan kepemilikan perahu oleh nelayan, yaitu tidak ada lagi nelayan yang memiliki perahu dengan ukuran sedang dan besar. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 2.



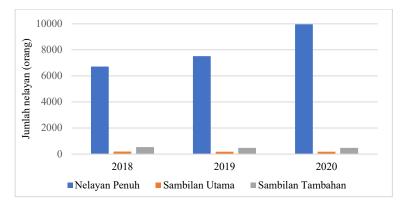
Gambar 2. Jumlah Perahu Nelayan di Kabupaten Majene Tahun 2018 – 2020. (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene *dalam* BPS Kabupaten Majene (2018-2020))

Jenis alat tangkap yang banyak digunakan adalah pancing rawai (43 persen), diikuti jaring insang hanyut (24 persen) dan pancing tonda (18 persen). Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Sebaran Jumlah Alat Penangkap Ikan di Kabupaten Majene Tahun 2018-2020. (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene *dalam* BPS Kabupaten Majene (2018-2020))

Jumlah nelayan dan petani di Kabupaten Majene tahun 2018 sampai tahun 2020, disajikan pada Gambar 4.



Gambar 4. Jumlah Nelayan di Kabupaten Majene Tahun 2018-2020 (Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene *dalam* BPS Kabupaten Majene (2018, 2019, 2021))

Produksi perikanan laut dan budidaya menurut jenis ikan di Kabupaten Majene pada tahun 2016 – 2018, disajikan Tabel 5.

Tabel 5. Produksi Ikan Kabupaten Majene Tahun 2016 - 2020

т : п		Tahun					
Jenis Ikan	2016	2017	2018	2019	2020		
Perikanan Tangkap (Ton)							
Tuna	436,7	456,0	1.103	568,9	911,5		
Cakalang	342,8	376,8	540	604,7	615,9		
Tongkol	556,7	582,8	539	1.554,8	1.211,4		
Layang	390,6	420,7	554	212,7	213,5		
Ikan terbang	251,0	270,9	567	663,8	644,8		
Ikan merah	86,7	104,0	366	409,3	437,7		
Ikan campuran	231,3	250,7	3.834	3.589,1	3.795,2		
Jumlah	2.296	2.462	7.503	7603,3	7830		
Perikanan Budidaya (Kg)							
Bandeng	na	483.229	483.229	372,1	400,4		
Udang windu	na	21.315	21.315	92,4	21,1		
Udang vaname	na	236.022	236.022	165,8	383,6		
Ikan lainnya	na	19.189	19.189	115,5	178,6		
Jumlah		759.755	759.755	745,8	983,7		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Majene dalam BPS Kabupaten Majene (2016-2020)

Struktur dan Pertumbuhan Produk Domestik Regonal Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan *output* (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Penyusunan PDRB menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (sektoral) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB juga menjadi indikator pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah atau wilayah, sebagaimana PDB yang berlaku secara nasional.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tahun 2018 di Kabupaten Majene tercatat mencapai nilai 3,04 triliun rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 5,73 % dari tahun 2010. Hal ini menggambarkan secara umum kemampuan sumber daya ekonomi di Kabupaten Majene mengalami peningkatan. Hal yang sama terlihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang mencatat nilai 3,38 triliun rupiah pada tahun 2018, atau terjadi peningkatan sebesar 6,29 % dibandingkan tahun 2010. PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene (Tabel 6).

Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK (juta rupiah) Kabupaten Majene, 2010-2019

Tahun	PDRB ADHB	PDRB ADHK	Pertumbuhan
	(Rp juta)	(Rp juta)	PDRB ADHK (%)
2010	2.075.030	2.075.030	-
2011	2.337.550	2.236.179	7,77
2012	2.587.345	2.401.042	7,37
2013	2.847.110	2.534.285	5,55
2014	3.182.500	2.669.800	5,35
2015	3.485.076	2.822.890	5,73
2016	3.801.801	2.992.581	6,01
2017	2.816.013	3.185.683	6,45
2018	4.618.391	3.378.612	6,06

Sumber: BPS Kabupaten Majene (2019)

Pada Tabel 6 dapat dilihat pahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Majene mengalami kenaikan dari 7,77% di tahun 2011 menjadi 7,37% di tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 mengalami penurunan cukup besar menjadi 5,55% pertumbuhannya dan terus mengalami penurunan di tahun 2014 sebesar 5,35%. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 5,73%, terus tumbuh sampai tahun 2017 menjadi 6,45%. Namun di akhir tahun 2018 pertumbuhan PDRB Kabupaten Majene menurun kembali menjadi sebesar 6,06%.

Struktur perekonomian di Kabupaten Majene masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu: 1) pertanian, kehutanan, dan perikanan; 2) administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan 3) jasa pendidikan. Hal ini terlihat dari sumbangan PDRB berdasarkan jenis lapangan usaha (Tabel 7). Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 37,48 % pada tahun 2010 dan 33,30 % pada tahun 2018. Setiap tahun pada sektor ini cenderung mengalami penurunan. Sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, menunjukkan perkembangan yang fluktuatif cenderung meningkat, dari 10,81% tahun 2010 menjadi 11,76% pada tahun 2018. Pada tahun 2010 sektor jasa pendidikan menyumbang sebesar 7,72 % dan meningkat menjadi 9,81% pada tahun 2018.

Peran sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Majena pada Tabel 14 memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sektor ekonomi terpenting belum tentu memiliki laju pertumbuhan yang tertinggi. Hal ini disebabkan oleh fokus pembangunan ekonomi pemerintah daerah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki dan juga sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Fenomena ini dapat dilihat pada Tabel 8 yang menyajikan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha pada Kabupaten Majene tahun 2010-2018.

Tabel 7. Distribusi PDRB Atas Dasar Konstan menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Majene Tahun 2010-2018

No	1 8	2010	2011	2012	2013	2015	2016	2017*	2018**
1	Pertanian, Kehutanan, dan	37,48	36,67	35,88	35,07	34,76	33,91	33,49	33,30
	Perikanan								
2	Pertambangan dan Penggalian	2,21	2,24	2,25	2,44	2,60	2,64	2,60	2,63
3	Industri Pengolahan	5,86	5,80	5,57	5,29	5,23	5,37	5,29	5,46
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12
5	Pengadaan Air, Pengelolaan	0,12	0,13	0,13	0,14	0,15	0,14	0,15	0,14
	Sampah, Limbah dan Daur								
_	Ulang								- 04
6	Konstruksi	7,29	7,41	7,46	7,41	7,49	7,56	7,67	7,91
7	Perdagangan Besar dan	9,88	9,89	9,74	9,85	9,97	9,82	9,71	9,66
	Eceran; Reparasi Mobil dan								
0	Sepeda Motor	1 00	1.00	1.07	1.00	1.00	1.00	1.00	1.74
8	Transportasi dan Pergudangan	1,99	1,99	1,87	1,82	1,88	1,90	1,80	1,74
9	Penyediaan Akomodasi dan	0,27	0,27	0,28	0,29	0,29	0,29	0,30	0,29
10	Makan Minum	4 22	4 2 4	4.61	4.02	4.00	4.00	5 10	5 40
10	Informasi dan Komunikasi	4,33	4,24	4,61	4,83	4,82	4,98	5,19	5,40
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,03	3,17	3,35	3,31	3,22	3,24	3,60	3,47
12	Real Estat	3,70	3,66	3,51	3,50	3,43	3,44	3,41	3,37
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan,	10,81	11,12	11,49	11,86	11,90	12,21	12,17	11,76
	Pertahanan dan Jaminan Sosial								
15	Wajib Jasa Pendidikan	7 72	8 20	0 70	0.00	0.25	0.50	0.60	0.91
15		7,72	8,20	8,78	9,09	9,25	9,50	9,60	9,81
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	1,28	1,34	1,41	1,49	1,45	1,45	1,48	1,50
17	Sosial	3,89	3,74	3,52	2 16	3,40	3,39	3,38	3,38
1 /	Jasa Lainnya TOTAL PDRB	100,0	100,0	100,00	3,46 100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	TOTALIDAD	100,0	100,0	100,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Sumber: BPS Kabupaten Majene (2019b)

Tabel 8. Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Konstan menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Majene Tahun 2010-2018

No	Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Pertumbuhan Kontribusi terhadap Total PDRB (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,96	34,94
2	Pertambangan dan Penggalian	8,82	2,47
3	Industri Pengolahan	5,49	5,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12,19	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	8,93	0,14
6	Konstruksi	7,40	7,57
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	5,89	9,79
8	Transportasi dan Pergudangan	4,44	1,86
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,04	0,28
10	Informasi dan Komunikasi	9,42	4,87
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,85	3,31
12	Real Estat	5,01	3,48
13	Jasa Perusahaan	5,83	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,02	11,63
15	Jasa Pendidikan	9,36	9,07
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,59	1,44
17	Jasa Lainnya	4,45	3,50

Sumber: BPS Kabupaten Majene (2019b)

Analisis Location Quotient (LQ)

Analisis sektor unggulan dilakukan dengan data yang tersedia diidentifikasi sektor unggulan melalui analisis *Location Quotient (LQ)*. LQ adalah perbandingan peran sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor/industri tersebut secara nasional sehingga diketahui sektor-sektor ekonomi dalam PDRB termasuk sektor basis dan non-basis (de Fretes, 2018). Hasil perhitungan nilai *LQ* berdasarkan nilai PDRB

menurut lapangan usaha maka sektor pertanian, kehutanan dan perikanan bukan sektor basis bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Majene karena hasil penghitungan nilai *LQ* tersebut kurang dari satu (0,86) (Tabel 9).

Tabel 9. Hasil Analisis LQ menurut Sub Sektor di Kabupaten Majene

No	Lapangan Usaha	LQ	Keterangan
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	Non Basis
1a	Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	0,54	Non Basis
1b	Kehutanan dan Penebangan Kayu	0,52	Non Basis
1c	Perikanan	1,70	Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	1,20	Basis
3	Industri Pengolahan	0,52	Non Basis
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,83	Basis
5	PengadaanAir, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,78	Non Basis
6	Konstruksi	0,86	Non Basis
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,08	Non Basis
8	Transportasi dan Pergudangan	1,21	Basis
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,24	Basis
10	Informasi dan Komunikasi	1,26	Basis
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,68	Basis
12	Real Estate	1,29	Basis
13	Jasa Perusahaan	0,68	Non Basis
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,34	Basis
15	Jasa Pendidikan	1,78	Basis
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,71	Non Basis
17	Jasa Lainnya	1,70	Basis

Sumber: BPS Kabupaten Majene (2019b)

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor non basis adalah karena kondisi geografis yang berbeda dengan daerah lain, infrastruktur yang tidak merata (Darma, *et al.*, 2015) sehingga berdampak pada tingginya harga input pertanian kepada petani. Tingginya harga input mempengaruhi harga output produk pertanian yang cenderung tinggi sehingga sulit bersaing dengan produk pertanian dari daerah lain (Setiawan *et al.*, 2016). Berdasarkan analisis LQ masing-masing subsektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Subsektor Jasa Pertanian memiliki nilai LQ yang cenderung meningkat sepanjang tahun 2012-2016, namun nilai rata-rata yang dihasilkan LQ < 1 yaitu 0,86.

Hasil analisis LQ ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Majene memiliki keunggulan komparatif dalam mengembangkan sektor perikanan sebagai pendorong pertumbuhan ekonominya. Lebih lanjut menurut kriteria Muta'ali (2015), sektor perikanan di Kabupaten Majene termasuk sektor basis dan unggulan dengan tingkat spesialisasi yang tinggi. Sektor perikanan juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi pasar yang berorientasi ekspor disamping juga melayani pasar dalam dan luar daerahnya.

Analisis Shift Share (SS)

Selanjutnya dilakukan analisis SS untuk mengetahui proses pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majene dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Barat. Menurut Wulandari (2016), teknik SS menggambarkan kinerja sektor-sektor suatu wilayah dibandingkan dengan kinerja perekonomian pada wilayah di atasnya. Hasil analisis SS memperkuat bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tingkat pertumbuhannya positif yang terutama berasal dari subsektor perikanan (Tabel 10).

Tabel 10. Hasil Analisis SS menurut Sub Sektor di Kabupaten Majene

No	Sektor/Industri	Komponen Pertumbuhan Propinsi	Komponen Bauran Industi	Komponen Keunggulan Kompetitif	PDRB
		(Nij)	(Mij)	(Cij)	(Dij)
			(Rp J	luta)	
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	130.606	138.934	982.061	1.251.601
	1a. Pertanian	61.033	(490.955)	(25.600)	(455.521)
	1b. Kehutanan	661	(34.777)	(1.999)	(36.115)
	1c. Perikanan	68.961	1.951.846	$(3\dot{3}2.542)$	1.688.264
2	Pertambangan dan penggalian	10.323	(266.842)	76.711	(179.808)
3	Industri pengolahan	18.727	1.206.810	(496.145)	729.392
4	Pengadaan listrik dan gas	250	23.144	(9.963)	13.431
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah,	443	(6.401)	(11.243)	(17.200)
	limbah dan daur ulang		` /	` ′	` /
6	Konstruksi	26.057	33.399	705.321	764.776
7	Perdagangan besar dan eceran;	41.963	(411.293)	846.426	477.095
	reparasi mobil dan sepeda motor		,		
8	Transportasi dan pergudangan	6.780	(429.455)	(68.828)	(491.504)
9	Penyediaan akomidasi dan makan	1.091	(35.027)	553	(33.383)
	minum		, ,		` /
10	Informasi dan komunikasi	18.120	429.090	231.055	678.264
11	Jasa keuangan dan asuransi	13.903	370.590	(842.523)	(458.029)
12	Real estate	13.219	(483.056)	91.899	(377.938)
13	Jasa perusahaan	183	(6.416)	(57)	(6.291)
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan	42.837	$(2.9\hat{5}6.666)$	267.454	(2.646.375)
	dan jaminan sosial		,		,
15	Jasa pendidikan	32.352	1.008.111	450.872	1.491.334
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5.287	(114.518)	47.095	(62.136)
17	Jasa lainnya	11.429	197.217	(283.550)	(74.905)
	Total	373.619	2.004.931	684.756	3.063.305

Sumber: BPS Kabupaten Majene(2019b)

Perubahan (pertumbuhan) nilai tambah sektor tertentu dalam PDRB Kabupaten Majene merupakan penjumlahan dari Provincial Share atau pertumbuhan nasional (Nij), Proportional Shift atau bauran industri (Mij), dan Differential Shift atau keunggulan kompetitif (Cij). Lebih lanjut, sub sektor perikanan di Kabupaten Majene berdasarkan analisis SS tahun 2016–2017 dipengaruhi oleh beberapa komponen (Tabel 10) yaitu komponen pertumbuhan nasional (Nij), bauran industri (Mij), dan keunggulan kompetitif atau daya saing (Cij).

Hasil analisis SS menunjukkan nilai komponen pertumbuhan nasional (Nij) positif yang berarti bahwa pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Barat telah mempengaruhi pertumbuhan PDRB Kabupaten Majene sebesar positif Rp 373.619.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Majene masih sangat bergantung pada perekonomian Provinsi Sulawesi Barat. Sektor perikanan memiliki pertumbuhan tercepat diantara sektor-sektor ekonomi lainnya yakni sebesar Rp 68.961.000.000. Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang dilakukan oleh Hasbiullah (2015) dan Mangilaleng *et al.* (2015) yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan sangat bergantung pada wilayah induknya.

Dengan menggunakan hasil analisis LQ dan SS, studi ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan masih memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian provinsi Sulawesi Barat karena subsektor perikanan menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Majene (LQ > 1). Selain itu, subsektor perikanan juga memiliki keunggulan kompetitif. Kondisi ini diperkuat dengan kondisi geografis Sebagian besar wilayah Kabupaten Majene yang merupakan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut.

Berdasarkan hasil analisis ini maka prioritas pembangunan ekonomi di Kabupaten Majene sebaiknya difokuskan pada subsektor perikanan sebagai sektor unggulan dan diarahkan pada produksi perikanan tangkap yang memiliki daya saing tinggi.

Kesimpulan

Pembangunan wilayah di Kabupaten Majene ditunjang oleh 17 sektor, termasuk perikanan yang dikelompokkan bersama dengan sektor pertanian dan kehutanan.

Dengan menggunakan hasil analisis LQ dan SS, studi ini menunjukkan bahwa subsektor perikanan masih memberikan kontribusi yang cukup besar untuk perekonomian provinsi Sulawesi Barat karena subsektor perikanan menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Majene (LQ > 1). Selain itu, subsektor perikanan juga memiliki keunggulan kompetitif. Kondisi ini diperkuat dengan kondisi geografis sebagian besar wilayah Kabupaten Majene yang merupakan wilayah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut.

Propinsi Sulawesi Barat perlu meningkatkan upaya pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Majene mengingat potensi perikanan yang besar dengan nilai ekonomis tinggi. Pengembangan perikanan secara terintegrasi diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi wilayah di Kabupaten Majene.

Daftar Pustaka

- Alhowaish, A.K., M.A. Alsharikh, M.A. Alasmail, dan Z.A. Alghamdi. 2015. Location Quotient Technique and Economy Analysis of Regions: Tabek Province of Saudi Arabia as a Case Study. International Journal of Science and Research, Vol. 4(12): 1756-1761.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. 2017. Kabupaten Majene Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik: Majene.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. 2018. Kabupaten Majene Dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik: Majene.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. 2019. Kabupaten Majene Dalam Angka 2019. Badan Pusat Statistik: Majene.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. 2019a. Indikator Strategis Statistik Sosial Kabupaten Majene 2018. Badan Pusat Statistik: Majene.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Majene. 2019b. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Majene Menurut Lapangan Usaha 2014-2018. Badan Pusat Statistik: Majene.
- Budiarso, A. 2015. Analisis Perkembangan Wilayah Dengan Sektor Unggulan di Kota Surakarta Tahun 2009-2013. [Skripsi]. Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Dahuri, R. 2002. Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan [Orasi Ilmiah]. Institut Pertanian Bogor: Bogor.
- Darma, D.C., Haryadi and E. Umiyati. 2015. Potensi Sektor Perekonomian di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. 2, 4 (Apr. 2015), 173 -180. DOI:https://doi.org/10.22437/ppd.v2i4.2613.
- De Fretes, P.N. 2018. Analisis Sektor Unggulan (LQ), Struktur Ekonomi (Shift Share), dan Proyeksi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Papua 2018. Develop, Vol. 1 (2): 40-53.
- Fattah, S. and A. Rahman. 2013. Analysis of Regional Economic Development on the Regency/Municipality at South Sulawesi Province in Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4(1): 1-9.

- Glasson, J. 1977. Pengantar Perencanaan Regional. Terjemahan Paul Sitohang. Lembaga Penerbit FE UI: Jakarta.
- Hasbiullah, S. 2015. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kabupaten Bulukumba. Iqtisaduna, Vol. 1 (1): 71-86.
- Mangilaleng, E.J., D. Rotinsulu & W. Rompas. 2015. Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol.15 (04): 193-205.
- Muta'ali, L. 2015. Teknik Analisis Regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang, dan Lingkungan. Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG), Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
- Rustiadi, E., S. Saefulhakim, dan D.R. Panuju. 2011. Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Crestpent Press dan Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Setiawan, E., S. Hartoyo, B.M. Sinaga and M.P. Hutagaol. 2016. Dampak Kebijakan Input, Output dan Perdagangan Beras terhadap Diversifikasi Pangan Pokok. Jurnal Agro Ekonomi: 34(2) 81-104. DOI: http://dx.doi.org/10.21082/jae.v34n2.2016.81-104
- Sjafrizal. 2014. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. Ed.1-2. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Wulandari, F.N. 2016. Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2015. [Skripsi]. Program Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.